

TAJUK RENCANA

Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual

BEBERAPA waktu lalu media memberitakan tuntutan pada Herry Wirawan. Terdakwa pemerkosa sejumlah santri tersebut, selain dituntut hukuman mati juga dituntut kebiri kimia. Tuntutan yang diharap akan bisa membuat jera dan menjadi pelajaran bagi pelaku kejahatan seksual lainnya. Mengapa?

Tidak bisa diingkari kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Hanya tampak yang di permukaan saja. Namun kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat semakin membuat miris. Kasus ayah di Wonosari yang dilaporkan ibu-anak yang memperkosa anak kandung (KR, 21/1). Juga guru silat di Karanganyar yang dilaporkan orang tua siswa perguruan karena menyetubuhi anak latihnya. (KR, 22/1). Realita yang harus menyadarkan kita, betapa kejadian itu dapat menjadi sangat dekat dengan kita.

Orang tua, guru adalah sosok pengayom yang mestinya membuat anak nyaman dan aman. Hanya dua contoh di atas menunjukkan pada kita betapa rumah dan sekolah – termasuk perguruan silat – bisa menjadi tempat tidak aman bagi anak.

Sejatinya, *warning* akan persoalan inces sudah disampaikan Komnas Perempuan ketika menyampaikan catatan akhir tahunnya, setiap memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret. Maret 2021 lalu, Komnas Perempuan mengingatkan soal perkosaan anak kandung atau inces, yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Meski menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 215 kasus, (tahun 2019 terdapat 822 kasus), namun kasus ini secara berturut-turut muncul sejak tahun 2016. Walau bukan berarti tidak terjadi, namun sebelumnya tidak ada laporan.

Perhatian diperlukan karena pelaku inces terbesar adalah ayah kandung.

Artinya, korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau mungkin keluarga sendiri. Kekhawatiran pengungkapan akan menyebabkan pecah atau konfliknya rumahtangga orang tua, membuat sosok yang seharusnya melindungi anak kian leluasa melakukan kejahatan seksual pada anaknya. Dan di masa pandemi seperti sekarang, tekanan serta ancaman bagi korban tentu meningkat. Karena 'terjebak' di dalam rumah yang sama lebih lama setiap harinya. Rumah tidak lagi menjadi zona nyaman dan aman bagi anak.

Dalam diskusi di Youtube Tempo (8/12/2021) Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) Pribudiartha Sitepu menyebut ada peningkatan tren kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu 2019 – 2021. Berdasarkan pengumpulan data milik Kemen-PPPA, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Karena itu, munculnya tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia pada Herry Wirawan seakan disambut masyarakat yang sudah sangat lelah dengan terus meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak (dan perempuan) selama ini.

Pasalnya, semua ini tidak lepas dari sistem perlindungan anak yang masih lemah di negeri ini. Betapapun ada UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, namun harus diakui penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual pada anak belum maksimal. Bukan mengutamakan hak anak, namun penegak hukum justru acap kali terjebak hukum acara mistik meminta korban memberikan bukti cukup dan menghadirkan saksi. Aneh bukan? Memberikan bukti dan saksi pada kejahatan tersembunyi. □

Pariwisata Adalah Bisnis Kepercayaan

BELUM normalnya geliat wisata, Yogyakarta kembali dihadapkan dengan fakta yang tidak sedap. *Head line* KR (21/01) mengulas terjadinya parkir *nuthuk* berulang lagi. Akibatnya, banyak media memewartakan. Dipastikan menjadi suguhan yang kurang sedap bagi Yogyakarta sebagai kota wisata. Pemerintah pun diharapkan segera bertindak agar kasus seperti ini tidak berulang.

Berkaca dari kasus ini, tampaknya banyak aspek perlu dibenahi guna mendorong pariwisata DIY lebih bertanggungjawab. Celah dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu harus dihilangkan. Mengapa?

Tiga Point

Sejatinya, pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Karena pariwisata buah dari interaksi antara produsen dan konsumen. Penyedia jasa wisata perlu serius memberikan layanan dan sebaliknya, konsumen rela mengeluarkan rupiah terhadap layanan yang diperolehnya asal sesuai harapan. Jangan sampai terjadi kekecewaan karena hal tersebut akan menimbulkan rusaknya pengalaman total. Kasus-kasus seperti halnya *nuthuk* tarif parkir ataupun harga pecel lele mestinya tidak patut lagi terjadi. Warga Yogyakarta adalah insan pariwisata yang perlu didorong untuk terampil mengejawantahkan nilai-nilai sadar wisata-sapta pesona. Tujuh pesona dalam sapta pesona patut diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Semua pihak perlu memahami bila pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Tiga point berikut penting disimak. Pertama, industri jasa ini bersifat *seasonal*, tergantung situasi, kadang ramai atau bahkan sebaliknya seperti saat Covid-19 melanda, pariwisata seolah mati suri. Namun, seiring dengan level pandemi yang diturunkan membuat masyarakat tumpah ke jalan membuang penat. Kondisi ini membuka kesempatan emas bagi para pelaku wisata mendulang pendapatan. Peluang meraup rejeki sebanyak

Destha T Raharjana

mungkin adalah hak setiap orang termasuk mereka yang memanfaatkan liburan. Namun, jangan sampai dinodai dengan adanya perilaku tidak terpuji. Guna menekan keluhan wisatawan. Modus perilaku *aji mumpung* masih saja berulang dalam praktek bisnis disaat *peak season*. Padahal perilaku seperti ini justru memberikan citra kurang sedap. Ungkapan Jawa, *tuna satak, bathi sanak*, baiknya



KR-JOKO SANTOSO

diyakini sebagai nilai positif dalam berbisnis di Yogyakarta agar lebih istimewa.

Kedua, dengan berwisata wisatawan dipaksa datang ke Jogja dan berharap mendapatkan pengalaman baru. Situasi ini memaksa pengelola untuk mampu bertanggungjawab dan melayani dengan sepenuh hati. Segala persiapan, baik itu pada objek, pengaturan arus keluar masuk wisatawan, pengaturan parkir, pos keamanan, pos kesehatan, peduli lingkungan, pos informasi ticketing dan lainnya perlu dipersiapkan secara seksama. Semua sarana itu harus siap. Jangan sampai memunculkan kekecewaan. Wisatawan yang kecewa akan lebih cepat *memposting* di media sosial. Tidak sedikit

wang kemudian menjadi viral. Untuk itu, mari sepakat untuk jangan diulangi. Hentikan perilaku *nuthuk*. Segala bentuk penetapan tarif perlu regulasi.

Kelaikan

Ketiga, pentingnya aspek keselamatan dan kenyamanan berwisata. Beberapa fasilitas wisata di Yogyakarta perlu dipastikan kelaikan dan standarnya agar menjamin keselamatan. Jangan sampai ada yang dirugikan. Di sinilah point pentingnya interaksi yang dilakukan penyedia jasa kepada wisatawan dilandasi niat ibadah. Pariwisata hadir sebagai sarana ibadah yang tujuannya menyenangkan hati orang lain. Oleh sebab itu, komitmen dan kesungguhan dan sikap profesional segenap pelaku wisata sangat diperlukan guna menumbuhkan kepercayaan dimata wisatawan.

Mampukah Jogja menuju destinasi yang bertanggungjawab? Jawabnya tentu memerlukan tindakan nyata. Kunci *service excellent* menjadi faktor penting yang dituntut dengan sentuhan melayani dengan hati. Jangan berpikir instan demi keuntungan sesaat. Guna mewujudkan pariwisata Jogja istimewa, diperlukan semangat dan budaya kerja di sanubari para pelaku usaha pariwisata. Agar bisnis yang dijalanannya lebih beretika, santun, bertanggungjawab, dilandasi hati dalam melayani wisatawan. Agar mereka semakin kangen kembali ke Jogja. □

*) Destha T Raharjana, peneliti Puspura UGM

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-1100
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mengelola Kebosanan

ADA yang berpendapat bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari terjadinya perubahan. Kita boleh sepakat dan boleh tidak sepakat. Namun satu hal yang pasti bahwa kita tentu pernah ditimpa dan merasakan apa yang disebut bosan. Hal ini sangat alamiah dan manusiawi. Kita tak perlu menghindarinya tapi harus mengelolanya. Banyak contoh yang dapat disebutkan terkait kebosanan ini. Terkurung dalam rutinitas yang itu-itu saja dapat membuat kita bosan. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sama setiap hari juga membuat kita bosan. Bahkan tidur terus menerus pun membuat kita bosan. Kita ingin sesuatu yang baru dan berbeda. Maka kita segera bangkit dan melakukan suatu tindakan.

Mungkin dari sinilah kita dapat menemukan penjelasannya. Kebosanan melahirlah keinginan, keinginan mendorong tindakan, dan tindakan menyebabkan terjadinya perubahan. Artinya, keinginan dan tindakan yang dikarenakan rasa bosan itulah yang membuat kita bergerak untuk melakukan perubahan. Sebab, sebesar apapun rasa bosan itu menghimpit dan menindih kita, bila tidak lahir keinginan serta tindakan, maka selamanya tidak akan pernah terjadi perubahan.

Pertanyaannya, bagaimana mengelola kebosanan? Banyak cara yang dapat dilakukan agar kita dapat mengelola kebosanan. Sekadar contoh ringan, bisa dengan berhenti sejenak dari penatnya rutinitas, bisa meluangkan waktu untuk rekreasi, ngobrol santai dengan keluarga atau rekan kerja, dan lain sebagainya. Namun, ada hal lain yang lebih penting terkait pengelolaan ke-

bosanan ini. Sebagaimana pendapat di atas yang mengatakan bahwa kebosanan merupakan penyebab terjadinya perubahan, maka poin pentingnya justru ada pada perubahan itu sendiri. Maksudnya, wujud atau bentuk perubahan seperti apa yang diinginkan terjadi akibat dari kebosanan tersebut. Itulah yang harus jadi perhatian utama.

Muhammad Ibnu Malik dalam kitab *Alfiyah*, menulis: wama ata mukholifan lima madho, fababuhu annaqlu kasukhtin waridho. Sesuatu yang datang kemudian yang berbeda dengan sesuatu yang terdahulu, maka pintunya adalah perpindahan dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik.

Dengan demikian, menyikapi dan mengelola kebosanan haruslah berorientasi menuju terjadinya perubahan menjadi lebih baik, secara kuantitas terlebih lagi secara kualitas. Di sinilah diperlukan kearifan memilah dan memilih suatu bentuk perubahan. Perlu dicatat bahwa dalam proses memilah dan memilih sesuatu mengandung makna menyisihkan yang lain.

Artinya, selalu terdapat ragam pilihan yang terbentang di hadapan kita. Kemudian kita dituntut bijak dalam menentukan pilihan. Tidak sekadar asal pilih demi menghindarkan diri dari kebosanan. Ketepatan dalam menjatuhkan pilihan akan membuat kita merasa bahagia, sedangkan kesalahan memilih dapat membuat kita menyesal dan kecewa. Dengan memahami hal ini, semoga kita dapat mengelola dan memanfaatkan kebosanan agar dapat terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dan menyenangkan.

DS Apandi, SDN 1 Padokan, Kasihan, Bantul.

Mengubah Arah, Mentransformasi Pendidikan

SEJAK ditetapkan Majelis Umum PBB pada 2018, setiap 24 Januari, dunia memperingati Hari Pendidikan Internasional (International Day of Education). Dalam peringatan tahun 2022 ini diusung tema *changing course, transforming education* (mengubah arah, mentransformasikan pendidikan).

Dunia pendidikan memang dituntut selalu melakukan perubahan-perubahan agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan dapat merespons berbagai masalah seperti pandemi covid-19 sekarang ini. Misalnya, dengan terjadinya perkembangan teknologi internet, digitalisasi pendidikan tidak dapat dihindarkan. Meskipun demikian, ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transformasi, yakni perubahan pendidikan seharusnya lebih pada aspek formalnya (misalnya dalam hal sistem, bentuk, metode, sarana pembelajaran), tetapi tidak pada substansinya yang menyangkut hakikat pendidikan itu sendiri.

Manusia Dewasa

Menurut N Driyarkara, pendidikan merupakan perbuatan yang kompleks dari banyak perbuatan yang secara keseluruhan diuruskan ke arah memanusiasi manusia. Untuk hidup sebagai manusia, seseorang harus di-manusia-kan (N Driyarkara, dalam A. Sudiarja dkk, 2006). Melalui pendidikan anak didik akan dituntut ke arah menjadi manusia yang dewasa, berkualitas, bertanggung jawab dan bermartabat sesuai dengan kondratnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena mutlak diperlukan dalam usaha memanusiasi manusia, agar seseorang bisa hidup sebagai manusia, maka tepat jika pendidikan dikategorikan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia. Idealnya penyelenggaraan pendidikan bersifat *non-profit oriented*.

Kenyataan? Penyelenggaraan pendidikan telah mengarah ke aktivitas bisnis yang berorientasi mencari keuntungan ekonomi. Khusus di Indonesia, komersialisasi pendidikan telah terjadi sejak dima-

Triyana Yohanes

sukkannya bidang pendidikan ke dalam bidang jasa yang diperdagangkan berdasar *the General Agreement on Trade in Services, 1994*. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia sekarang ini-pun lebih cenderung memperlakukan pendidikan sebagai bidang jasa yang bisa diperdagangkan dengan tujuan mencari keuntungan. Misalnya berdasar paragraf 12 Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha. Dengan demikian penyelenggara pendidikan di Indonesia termasuk dalam pengertian kegiatan bisnis yang bersifat mencari keuntungan ekonomi.

Contoh lain, sekarang ini penyelenggara pendidikan tinggi juga secara tidak langsung dituntut untuk terakreditasi internasional melalui berbagi lembaga akreditasi asing meskipun dengan biaya yang cukup mahal. Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia sekarang juga berangsur-angsur diserahkan kepada Lembaga Akreditasi Mandiri dengan biaya yang cukup tinggi dan tidak lagi oleh Badan Akreditasi Nasional yang tanpa harus membayar. Dengan demikian biaya penyelenggaraan pendidikan menjadi semakin mahal. Hal ini menambah wajah pendidikan Indonesia menjadi bersifat kegiatan bisnis, bukan lagi menjadi kegiatan untuk pemenuhan hak asasi manusia.

Komersialisasi

Konsekuensi komersialisasi pendidikan adalah biaya untuk memperoleh pendidikan menjadi semakin mahal, sehingga tidak terjangkau mereka yang miskin secara ekonomi meskipun mampu secara akademik. Pendidikan akan menjadi bersifat eksklusif, karena hanya bisa dinikmati mereka yang mampu membayar.

Hal ini akan meningkatkan ketidakmerataan dalam pemenuhan hak atas pendidikan. UNESCO menyebutkan, sekarang masih terdapat 617 juta anak dan orang dewasa yang tidak bisa membaca dan mengerjakan matematika dasar di seluruh dunia (<https://en.unesco.org/comemorations/educationday>). Sedangkan di Indonesia, berdasar survey Badan Pusat Statistik tahun 2020, penduduk yang masih buta huruf mencapai jumlah 2.961.060 orang (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09>). Mereka adalah orang-orang yang belum terpenuhi haknya atas pendidikan, sehingga mengalami ketidakadilan.

Melalui Peringatan Hari Pendidikan Internasional kita semua diajak berjuang untuk mengembalikan pendidikan ke hakikat dasarnya, yakni sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia. Inklusivitas pendidikan harus ditingkatkan agar terbuka untuk semua orang, karena setiap orang berhak atas pendidikan yang baik dan berkualitas. □

*) Dr Triyana Yohanes SH MHum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pojok KR

Sukmawati – Prisca ‘adu kekuatan’ dalam suksesi Mangkucanegara
-- Siapa ‘perempuan kuat’ dan menentukan?

Kamus Jawa – Indonesia diluncurkan
-- Semoga mempermudah orang belajar Bahasa Jawa

Vandalisme pada cagar budaya, memrihatinkan

-- Bisa masuk kategori kriminalitas

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%